



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
DALAM RANGKA PENELAAHAN BAKN DPR RI TERHADAP LHP BPK RI
TENTANG
PENYERTAAN MODAL NEGARA PADA BUMN & LEMBAGA LAINNYA
KOTA BEKASI, 03—05 APRIL 2024
MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2023—2024**

I. PENDAHULUAN

Kerangka Acuan Kerja

Definisi secara umum penyertaan modal yaitu suatu usaha untuk memiliki perusahaan yang baru atau yang sudah berjalan, dengan melakukan setoran modal ke perusahaan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 disebutkan bahwa Penyertaan Modal Negara yang selanjutnya disingkat PMN adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN untuk dijadikan sebagai modal Perusahaan Negara dan/ atau Perseroan Terbatas lainnya serta Lembaga/Badan Lainnya, yang pengelolaannya dilakukan secara korporasi. Hal tersebut juga dinyatakan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146/PMK.06/2022 tentang Penyusunan Kajian, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Penyertaan modal negara pada perusahaan negara.

Lebih lanjut, Penyertaan modal pemerintah pusat/daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara. Adapun bentuk-bentuk PMN adalah Tunai, yakni Pemerintah memberikan sejumlah uang kepada BUMN; Konversi piutang Pemerintah yaitu Pemerintah mengkonversi utang BUMN kepada Pemerintah menjadi PMN; dan Hibah saham/aset dari pihak lain. Lebih lanjut, maksud dan tujuan penambahan PMN kepada BUMN tercantum dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-1/MBU/03/201 tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan, dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.

Dari sisi anggaran, pada tahun 2022 Kementerian BUMN mengusulkan PMN kepada 12 BUMN dengan total Rp 72,4 triliun. Secara umum total investasi

pemerintah dalam bentuk PMN pada periode 2005-2021 kepada BUMN sebesar Rp 361,3 triliun dan kepada BLU sebesar Rp334,3 triliun atau total keseluruhan sebesar Rp 695,6 triliun. Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 disebutkan realisasi pembiayaan PMN/Investasi pemerintah sebesar Rp 113,46 triliun atau 72,99% dari anggaran Rp 155,46 triliun. PMN ini antara lain terdiri atas PMN untuk BUMN, PMN pada organisasi/lembaga keuangan internasional, PMN dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan PMN/Investasi lainnya.

Berdasarkan Undang-undang APBN/APBN-P selama periode Tahun 2015-2018 diketahui terdapat 71 transaksi penyaluran PMN kepada 50 BUMN (4 berada di lingkungan Kementerian Keuangan dan 46 berada di lingkungan Kementerian BUMN). PMN diberikan dalam bentuk tunai maupun non tunai dengan total anggaran sebesar Rp125,40 triliun, yaitu tahun 2015 sebesar Rp64,88 triliun, tahun 2016 sebesar Rp50,53 triliun, tahun 2017 sebesar Rp6,37 triliun, dan tahun 2018 sebesar Rp3,60 triliun.

Lebih lanjut lagi, secara detail, Alokasi APBN pada lima program prioritas nasional yang dibiayai dana penyertaan modal negara (PMN) tunai tahun 2015-2018 senilai Rp88,58 triliun sebanyak 41 BUMN (termasuk 5 anak perusahaan) dan realisasi penyaluran dana sebesar Rp88,57 triliun dan telah digunakan sebesar Rp79,4 triliun, terdapat sisa dana sebesar Rp8,93 triliun per 30 September 2019. Adapun lima program prioritas nasional tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. PMN kepada BUMN untuk mendukung Program Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas sebesar Rp62,41 triliun, antara lain ditujukan untuk pengembangan bandara, penyelesaian jalan tol strategis dan pembangunan jalan tol trans Sumatera, kawasan ekonomi khusus, proyek pembangkit listrik 35 GW, Infrastruktur LRT Jabodetabek.
2. PMN kepada BUMN untuk mendukung Program Kedaulatan Pangan sebesar Rp10,67 triliun ditujukan antara lain untuk mendukung program swasembada pangan, pengadaan benih, peningkatan produksi gula dan garam, serta peningkatan produksi ikan nasional.
3. PMN kepada BUMN untuk mendukung Program Pembangunan Maritim sebesar Rp 5,15 triliun, antara lain ditujukan untuk pengembangan kepelabuhan di Indonesia timur, penyediaan kapal penumpang dan kapal barang, perbaikan dan pengembangan terminal ferry, serta pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan kapal.
4. PMN kepada BUMN untuk mendukung Program Industri Pertahanan dan Keamanan, sebesar Rp 2,60 triliun antara lain ditujukan untuk peningkatan kapasitas produksi, modernisasi fasilitas produksi, mengantisipasi berkembangnya pasar, dan meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia.
5. PMN kepada BUMN untuk mendukung Program Kemandirian Ekonomi Nasional sebesar Rp 4,25 triliun, antara lain ditujukan untuk pembiayaan, penjaminan kredit usaha rakyat dan pendampingan UMKM.

Dari sisi audit/pemeriksaan, berdasarkan IHPS I Tahun 2022, BPK RI melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas Pengelolaan Program yang Dibiayai Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai Tahun 2015 s.d. 2018 pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan BUMN Penerima PMN di Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan dan Maluku Utara (LHP: 22 April 2021). Dari LHP tersebut terdapat **70 temuan** senilai Rp383,97 miliar dan USD 11.88 juta dengan **107 permasalahan** dan 113 rekomendasi. Lebih detail lagi, permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan kerugian sebesar Rp166,48 miliar, potensi kerugian sebesar Rp30,18 miliar serta kekurangan penerimaan sebesar Rp86,49 miliar dan USD 11.88 juta.

Berdasarkan uraian pada bagian kerangka acuan kerja ini, BAKN DPR RI memandang perlu untuk melakukan kunjungan kerja di Kota Bekasi untuk meminta penjelasan dan masukan dari PT. Waskita Karya Tbk., Kementerian Keuangan RI dan Kementerian BUMN terkait dengan PMN di BUMN, khususnya pada PT Waskita Karya Tbk. Melalui kunjungan kerja tersebut, BAKN DPR RI diharapkan mendapatkan penjelasan, masukan dan informasi yang lebih lengkap dan utuh dalam melakukan penelaahan tentang Penyertaan Modal Negara pada BUMN dan lembaga lainnya.

II. PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA

A. Agenda Kegiatan

Agenda kegiatan atas pelaksanaan kunjungan kerja BAKN DPR RI di Kota Bekasi adalah meminta penjelasan dan masukan dari PT. Waskita Karya (Persero) Tbk, Kementerian Keuangan RI dan Kementerian BUMN terkait dengan PMN pada BUMN, sekaligus melakukan kunjungan lapangan pada ruas tol Bekasi—Cawang—Kampung Melayu. Kunjungan kerja ini dimaksudkan untuk mendapatkan penjelasan dan masukan yang terkait dengan informasi atau gambaran lebih detail tentang permasalahan penyertaan modal negara (PMN), mekanisme pelaksanaan dan alokasi PMN, pengawasan—penggunaan PMN, kendala dan hambatan pelaksanaan PMN, manfaat dan dampak sosial PMN bagi masyarakat serta untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang dilampirkan pada TOR sebagai bahan penelaahan BAKN DPR RI.

Kegiatan kunjungan kerja BAKN DPR RI dilaksanakan di Kota Bekasi pada tanggal 03—05 April 2024.

B. Susunan Keanggotaan Tim

Tim Kunjungan Kerja BAKN DPR RI dalam rangka mendapat masukan terkait dengan penelaahan BAKN DPR RI Tentang Penyertaan Modal Negara pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023—2024, Kota Bekasi, 03—05 April 2023.

No.	No. Angg.	Nama	Keterangan
1.	A-533	H.WAHYU SANJAYA,S.E, M.M	KETUA BAKN DPR RI/ F-PD
2.	A-201	Prof. Dr. HENDRAWAN SUPRATIKNO	WAKIL KETUA BAKN DPR RI/ F-PDIP
3.	A-423	Dr. Hj. ANIS BYARWATI	WAKIL KETUA BAKN DPR RI/ F-PKS
4.	A-314	H.MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.	ANGGOTA BAKN DPR RI/ F-GOLKAR
5.	A-83	Ir. IRWAN ARDI HASMAN	ANGGOTA BAKN DPR RI/ F-GERINDRA
6.	A-18	Drs. H. FATHAN, M.A.P	ANGGOTA BAKN DPR RI /F- PKB
7.	A-495	AHMAD NAJIB QODRATULLAH, S.E.	ANGGOTA BAKN DPR RI/ F-PAN
8.	A-476	Dr. H.M. AMIR USKARA, M.KES	ANGGOTA BAKN DPR RI/ F-PPP
SEKRETARIAT TIM KUNKER			
9.	--	PARID, S.E., M.H.	KASUBBAG RAPAT
10.	--	SENO WIBISUKMANA, S.KOM., QRMA., CGAA	STAF SET. BAKN
11.	--	RINA SULISTINA, S.E.	STAF SET. BAKN
12.	--	MAFTUCHAH	STAF SET. BAKN
13.	--	ARMAY ADELIA MAHARANI BASUKI, A.Md	STAF BIRO PERSIDANGAN II
14.	--	HAFIZ DWI PUTRA	STAF SET. BAKN
15.	--	FEBRI KUNTARTO, S.E., M.B.A.	TENAGA AHLI BAKN
16.	--	ANDI MUHAMMAD SADLI, S.E., M.Si.	TENAGA AHLI BAKN
17.	--	DODY MUHARAM	TV PARLEMEN
18.	--	PUNTHO PRANOWO WIENAHYU	METAKSOS
19.	--	HARIMAN SIREGAR	DRIVER

C. Pelaksanaan Kegiatan

Kunjungan kerja BAKN DPR RI Tentang Penyertaan Modal Negara Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023—2024 di Kota Bekasi dihadiri oleh:

- I. 1. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan:
 1. Meirijal Nur - Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan
 2. Qoswara - Kepala Subdirektorat KND I
 3. Heni Widiyastuti - Kepala Seksi KND IC
 4. Riandika Haryo P - Pelaksana Seksi KND IC
 5. Fety Rahayu N - Pelaksana Seksi KND IC
2. Kanwil DJKN Jawa Barat:
 1. Tugas Agus Priyo Waluyo - Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat
 2. Didith Andreas Andiana - Kepala Bidang PKN
Kanwil DJKN Jawa Barat
3. Biro KLI Kemenkeu:
 1. Arinto Setyo Mulyawan, Kepala Bagian Manajemen Hubungan Kelembagaan Negara
 2. Ricky Yohannes, Kepala Subbagian Hubungan Kelembagaan Negara II
 3. Soleh Pulungan, Pelaksana Biro KLI
 4. M Reza Pahlevi, Pelaksana Biro KLI.
- II. Kementerian Badan Usah Milik Negara Republik Indoneisa:
 1. Anindita Eka Wibisono, Asisten Deputi Bidang Jasa Infrastruktur.
- III. Waskita Karya:
 1. Muhammad Hanugroho, Direktur Utama
 2. Wiwi Suprihatno, Direktur Keuangan
 3. Rudi Purnomo, Direktur Pengembangan Bisnis

Penjelasan dan masukan terkait dengan penyertaan modal negara masing-masing sebagai berikut.

Kementerian Keuangan – DJKN

Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan, Kementerian Keuangan menyampaikan beberapa hal terkait dengan kebijakan Penyertaan Modal Negara sebagai berikut.

1. Seluruh permasalahan pada BUMN termasuk dan tidak terbatas pada PT Waskita Karya (Persero) Tbk., telah diselesaikan secara komprehensif. Penyelsaian permasalahan tersebut dengan mempertimbangkan pendekatan korporasi—tatakelola PMN terus dilakukan dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan—realisasi dan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas penggunaan BUMN pada PMN melalui ketentuan perundang-undangan. Selain pendekatan korporasi, juga dipertimbangkan penyelesaiannya melalui belanja dukungan konstruksi pada APBN.

2. Dengan demikian permasalahan BUMN harus dilihat secara komprehensif dan tidak secara parsial dengan berbagai pendekatan yang memiliki keterkaitan satu dengan yang lain sehingga perlu saling berkolaborasi mendorong sinergi antar BUMN.
3. Tanggung Jawab pemerintah dan tanggung jawab perseroan (korporasi) berjalan secara sekaligus. Pemerintah selalu memantau BUMN yang tidak menjalankan aksi korporasi secara tidak disiplin. Demikian pula dengan BUMN yang memiliki portofolio bisnis dengan kinerja baik, juga dimonitor oleh pemerintah.
4. Penyelesaian permasalahan BUMN memiliki pintu masuk sebagai solusi. Penyelesaian dengan pendekatan neraca—liabilitas, dukungan konstruksi, pendekatan dengan melihat volume harian lalu lintas rata-rata (LHR) atau pembiayaan melalui belanja modal pemerintah pada APBN.
5. Hal-hal lain yang terkait dengan permasalahan PMN dan pertanyaan yang disampaikan oleh BAKN DPR pada TOR telah dijawab secara spesifik sebagaimana terlampir pada materi presentasi.

Kementerian BUMN

Kementerian BUMN menyampaikan beberapa hal sebagai berikut.

1. Sejalan dengan kementerian keuangan, kementerian BUMN mengevaluasi seluruh BUMN yang mendapatkan PMN dan menindaklanuti permasalahan PMN pada BUMN secara komprehensif melalui *exit strategy* baik dengan pendekatan komersil BUMN, pendekatan PMN maupun pendekatan dukungan konstruksi melalui APBN.
2. Terkait dengan PMN TA 2021 yang diberikan kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk. dalam rangka pembangunan Jalan Tol Kayu Agung-Palembang-Betung dilanjutkan pembangunannya oleh PT Hutama Karya (Persero) yang diselesaikan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 Tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera yang mendalilkan bahwa “Pengusahaan ruas jalan tol Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j, Tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan Tahap .IV sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat setelah mendapat pertimbangan Menteri Keuangan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara. Dalam pada itu, pengembalian investasi PT Hutama Karya (Persero) dalam rangka penugasan untuk melakukan pengusahaan 24 (dua puluh empat) ruas jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Jalan Tol Palembang-Betung (bagian dari ruas Jalan Tol Kayu Agung Palembang-Betung) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bersumber dari dana yang diperoleh dari: a. pengguna jalan tol; dan/atau b. Pemerintah.

3. Gambaran umum PMN Waskita terdiri atas : Pertama, PMN TA 2015 diberikan kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk, dalam rangka pembangunan:
 - a. Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu, Pejagan-Pemalang, Pemalang Batang, Batang-Semarang, Ciawi Sukabumi, Solo Ngawi, Ngawi Kertosono, Cinere-Serpong Jaya, Citra Waspphutowa (Depok Antasari), Kanci Pejagan (SMR), Pasuruan-Probolinggo, KKDM Seksi 2, Cimanggis-Cibitung (CCT);
 - b. Transmisi 500 KV Sumatera;
 - c. Ruas Tol Lain (Legundi-Bunder dan Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi).

Kedua, PMN TA 2021 diberikan kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk. dalam rangka pembangunan:

- a. Jalan Tol Kayu Agung-Palembang-Betung;
 - b. Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu;
 - c. Jalan Tol Cimanggis –Cibitung;
 - d. Jalan Tol Ciawi-Sukabumi;
 - e. Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar;
 - f. Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo;
 - g. Jalan Tol Pejagan-Pemalang.
4. Output PMN pada Waskita Karya adalah terbangunnya jalan penghubung yang bertujuan untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas kendaraan dengan outcome yang berdampak multipliers terhadap penyerapan tenaga kerja (*Employment's Multiplier*); Dampak multipliers terhadap pembentukan Nilai Tambah Bruto pada perekonomian nasional (*Gross ValueAdded Multipliers*); Dampak multipliers pada perekonomian nasional (*Output Multipliers*); dan Dampak multipliers terhadap peningkatan pendapatan tenaga kerja (*Income Multipliers*).
 5. Hal-hal lain yang terkait dengan permasalahan PMN dan pertanyaan yang disampaikan oleh BAKN DPR pada TOR telah dijawab secara spesifik sebagaimana terlampir pada materi presentasi.

PT. Waskita Karya (Persero) Tbk.

Direktur Utama PT. Waskita Karya (Persero) Tbk., menyampaikan beberapa hal terkait dengan perkembangan dan dinamika atas berbagai proyek penugasan pemerintah dan Penyertaan Modal Negara Pada PT. Waskita Karya (Persero) Tbk.

1. Terhadap berbagai permasalahan keuangan yang dihadapi oleh PT Waskita Karya (Persro) Tbk., berbagai langkah dan strategi yang akan dijalankan antara lain dan tidak terbatas pada restrukturisasi utang. Program restrukturisasi bagian dari salah satu program penyehatan perusahaan.

Tujuannya bisa karena bermacam-macam akibat, seperti arus kas terganggu, hutang tidak terbayar, dan lain-lain.

2. Restrukturisasi pinjaman dilakukan terutama pada proyek-proyek bernilai strategis dan valuasinya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, seperti 3 dari 4 seri obligasi non penjaminan pemerintah yang rencananya akan di restrukturisasi telah mendapatkan persetujuan. Usulan skema restrukturisasi akan disampaikan kembali kepada Pemegang Obligasi PUB III Tahap IV tahun 2019 melalui RUPO kedepannya (Waskita, 2024).
3. PT Waskita Karya (Persero) membutuhkan tambahan PMN untuk melanjutkan proyek-proyek strategis yang sulit dilakukan tanpa penambahan PMN dari pemerintah.
4. Dalam hal penyelesaian tunggakan pembayaran pada vendor, penyelesaian dilakukan secara korporasi dan diupayakan penyelesaiannya tidak sampai kepada gugatan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) di pengadilan negeri.
5. Terkait dengan suspensi saham PT Waskita oleh Bursa Efek Indonesia, PT Waskita akan mengupayakan segala cara agar tidak terjadi “delisting” terhadap saham WSKT yang akan menyebabkan penilaian public terhadap perusahaan semaink buruk.
6. PT Waskita mempertimbangkan “*haircut*” untuk mengurangi asumsi nilai sekuritas untuk memperhitungkan risiko penurunan nilai pasar saat aset harus dijual. *Haircut value* saham adalah persentase tertentu dari suatu saham yang ditetapkan oleh Kliring Penjamin Efek Indonesia (KPEI) sebagai pengurang nilai pasar suatu saham. Dalam menetapkan nilai haircut, KPEI dibantu dengan *Komite Haircut*.
7. PT Waskita berkomitmen untuk memperbaiki tatakelola perusahaan dan mengupayakan penyelesaian keuangan secara komprehensif dan munculnya perusahaan “*Waskita*” *new chapter* yang lebih menjanjikan dan menjadi BUMN yang tangguh.
8. Direktur Pengembangan Usaha PT Waskita Karya (Persero) menekankan pentingnya restrukturisasi keuangan perusahaan dalam berbagai macam bentuknya. Di segi yang lain, tahun 2023, secara bisnis, PT Waskita mempunyai kontrak baru yang didapatkan secara korporat senilai Rp17 Triliun.
9. Evaluasi lain yang disampaikan oleh Direktur Pengembangan Usaha PT Waskita Karya (Persero) Tbk., adalah terdapat sembilan ruas jalan tol yang telah terjual dan terdapat proyek transmisi yang diterminasi karena PMN tidak lagi diberikan pada proyek transmisi tersebut.

Tanggapan dan Respons Pimpinan—Anggota BAKN DPR RI

Ir. Irwan Ardy Hasman

Mendalami kinerja keuangan dan FY23 dan kinerja operasional secara lebih khusus. Bagaimana proses belanja PMN secara teknis dilakukan. Selain itu, peningkatan realisasi Lalu Lintas Harian (“LHR”) tol Becakayu, yang saat ini hanya tercapai sebesar 20% dari PPJT yang direncanakan. Waskita telah memohon dukungan kepada Pemerintah dalam bentuk Dukungan Konstruksi (“Dukon”) untuk penyelesaian jalan tol Becakayu seksi 2B. Dengan adanya Dukon akan menyambungkan konektivitas tol Becakayu ke tol Japek. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan LHR dan valuasi IRR yang lebih tinggi dari sebelumnya 4,48% menjadi 7,21% sehingga kinerja PT Waskita Karya (Persero) Tbk., lebih optimal.

Dr. Hj. Anis Byarwati, M.Si. – Wakil Ketua BAKN DPR RI

1. Kondisi BUMN yang mendapatkan PMN perlu mendapatkan perhatian untuk terus ditingkatkan terutama BUMN yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat dan memiliki efek berganda perekonomian.
2. Lebih jauh, Wakil Ketua BAKN DPR RI menyoroti tentang restrukturisasi utang Wijaya Karya dan solusinya. Lebih jauh lagi, dari proses restrukturisasi itu, perlu diperjelas porsi yang menjadi tanggung jawab perseroan dan porsi yang menjadi tanggung jawab pemerintah.

H. Mukhamad Misbakhun, S.E., M.H.

Terhadap persoalan obligasi dan kewajiban PT Waskita Karya (Persero) Tbk., yang perlu mendapatkan solusi dan penyelesaian secara menyeluruh (komprehensif). Persoalan Waskita Karya tidak bisa diselesaikan secara parsial karena itu diperlukan penyelesaian dari sisi penguatan permodalan perseroan untuk bisa sustain di masa yang akan datang, dan penyelesaian dari sisi penyelesaian terhadap seluruh proyek proyek mandatory dari pemerintah untuk dapat diselesaikan secara tuntas.

H. Wahyu Sanjaya, S.E., M.M. – Ketua BAKN DPR RI

Ketua BAKN DPR menegaskan tentang proyek transmisi Listrik 500 KV Sumatera dengan nilai PMN 583,65 (Rp Miliar), realisasi 100%. Namun demikian, proyek transmisi ini diterminasi karena masih memerlukan penyelesaian pada tahap berikutnya. Terminasi proyek dilakukan karena pembiayaan proyek pada tahap penyelesaian membutuhkan tambahan PMN. Lebih lanjut, proyek transmisi listrik ini perlu didukung dan diselesaikan karena sangat dibutuhkan di Wilayah Sumatera.

IV. KESIMPULAN/KEPUTUSAN DAN SARAN

Kesimpulan Pertemuan dengan PT. Waskita Karya (Persero) Tbk., Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN tentang Penyertaan Modal Negara Pada BUMN dan Lembaga lainnya di ruas toll Kota Bekasi—Cawang—Kp. Melayu.

1. Seluruh permasalahan pada BUMN termasuk dan tidak terbatas pada PT Waskita Karya (Persero) Tbk., telah diselesaikan secara komprehensif. Penyelsaian permasalahan tersebut dengan mempertimbangkan pendekatan korporasi—tatakelola PMN terus dilakukan dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan—realisasi dan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas penggunaan BUMN pada PMN melalui ketentuan perundang-undangan. Selain pendekatan korporasi, juga dipertimbangkan penyelesaiannya melalui belanja dukungan konstruksi pada APBN.
2. Kementerian BUMN bersama dengan Kementerian Keuangan menetapkan Key Performance Indes (KPI) khusus untuk PMN. Penilaian atas IKU/KPI PMN merupakan bagian dari KPI Kolegial BUMN yang dilakukan dengan merujuk kepada PMK Nomor 146/PMK.06/2022 tentang Penyusunan Kajian, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Penyertaan Modal Negara pada Perusahaan Negara dan Badan Hukum Lainnya. KPI PMN berfokus pada 2 perspektif yaitu perspektif output dan perspektif outcome/manfaat.
3. Terkait dengan PMN TA 2021 yang diberikan kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk. dalam rangka pembangunan Jalan Tol Kayu Agung-Palembang-Betung dilanjutkan pembangunannya oleh PT Hutama Karya (Persero) yang diselesaikan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 Tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol Di Sumatera
4. Perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi PMN perlu terus ditingkatkan sehingga tetap berdampak pada kesejahteraan masyarakat melalui multiplier effect perekonomian.
5. Terhadap berbagai permasalahan keuangan yang dihadapi oleh PT Waskita Karya (Persro) Tbk., berbagai langkah dan strategi yang akan dijalankan antara lain dan tidak terbatas pada restrukturisasi utang. Program restrukturisasi bagian dari salah satu program penyehatan perusahaan. Tujuannya bisa karena bermacam-macam akibat, seperti arus kas terganggu, hutang tidak terbayar, dan lain-lain.
6. Terkait dengan pelaksanaan proyek strategis yang didanai dari PMN, tanggung jawab pemerintah dan tanggung jawab perseroan (korporasi) berjalan secara sekaligus. Pemerintah selalu memantau BUMN yang tidak menjalankan aksi korporasi secara tidak disiplin. Demikian pula dengan BUMN yang memiliki portofolio bisnis dengan kinerja baik, juga dimonitor oleh pemerintah.
7. Upaya perbaikan tatakelola PMN terus dilakukan dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan—realisasi dan evaluasi untuk meningkatkan

efektivitas penggunaan BUMN pada PMN terutama yang berdampak langsung pada kesejahteraan dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

8. PT Waskita Karya (Persero) Tbk., membutuhkan tambahan PMN untuk melanjutkan proyek-proyek strategis yang sulit dilakukan tanpa penambahan PMN dari pemerintah.

V. PENUTUP

Dari kunjungan kerja ini, BAKN DPR RI dapat memperoleh secara langsung penjelasan, masukan dan pandangan serta pendapat dari PT. Waskita Karya (Persero) Tbk., Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN terkait dengan PMN di BUMN khususnya di PT Waskita Karya. Melalui kunjungan kerja ini, diharapkan menjadi sarana bagi BAKN DPR RI dalam rangka meningkatkan pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap keuangan negara. Selain meningkatkan fungsi pengawasan DPR, kunjungan kerja sekaligus untuk menyerap aspirasi dan mendapatkan solusi secara bersama-sama antara BUMN dan kementerian/Lembaga dalam rangka perbaikan kebijakan, tata kelola dan pemanfaatan Penyertaan Modal Negara pada BUMN dan lembaga lainnya yang lebih baik pada masa yang akan datang.
